



## ***Literature Review: Implementasi Advokasi Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis***

**Arini Dwi Rahmadani<sup>1\*</sup>, Raudhiyah Hasanah Rambe<sup>2</sup>, Dinda Purnama Sari<sup>3</sup>,  
Fatimah Az Zahra Lubis<sup>4</sup>, Miftahurrahmah El Hayatli<sup>5</sup>**

<sup>1-4</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ariniirc@gmail.com](mailto:ariniirc@gmail.com)

**Abstract.** Tuberculosis remains a public health problem in Indonesia, with a relatively high number of cases and mortality rates. The success of tuberculosis control programs requires various efforts, one of which is health advocacy aimed at gaining policy support, funding, and the involvement of various parties in disease prevention and control. This study aims to analyze the implementation of advocacy in tuberculosis prevention and control and identify the roles and obstacles that influence the success of TB control programs. The method used was a literature review with a qualitative descriptive approach. Articles were obtained through Google Scholar using keywords related to health advocacy and tuberculosis. A total of 10 articles that met the inclusion criteria were analyzed descriptively to identify the implementation, benefits, and obstacles of advocacy in tuberculosis control. The results of the study indicate that the implementation of health advocacy plays a role in increasing public knowledge, strengthening cross-sector partnerships, supporting early case detection, improving treatment adherence, reducing stigma against sufferers, and encouraging policy support and empowering health cadres. However, its implementation still faces obstacles such as limited funding, suboptimal policy support, low community participation, and weak cross-sector coordination. Therefore, it is necessary to strengthen advocacy through increased government commitment, adequate budget support, and community empowerment so that the tuberculosis control program can run more effectively and sustainably.

**Keywords:** Community Empowerment; Health Advocacy; Health Policy; TB Control; Tuberculosis.

**Abstrak.** Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan jumlah kasus dan angka kematian yang relatif tinggi. Keberhasilan program pengendalian tuberkulosis memerlukan berbagai upaya, salah satunya melalui advokasi kesehatan yang bertujuan memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis serta mengidentifikasi peran dan hambatan yang memengaruhi keberhasilan program pengendalian TB. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Artikel diperoleh melalui *Google Scholar* menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan advokasi kesehatan dan tuberkulosis. Sebanyak 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk implementasi, manfaat, dan hambatan advokasi dalam penanggulangan tuberkulosis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi advokasi kesehatan berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperkuat kemitraan lintas sektor, mendukung penemuan kasus secara dini, meningkatkan kepatuhan pengobatan, mengurangi stigma terhadap penderita, serta mendorong dukungan kebijakan dan pemberdayaan kader kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan, belum optimalnya dukungan kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan advokasi melalui peningkatan komitmen pemerintah, dukungan anggaran yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat agar program penanggulangan tuberkulosis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Advokasi Kesehatan; Kebijakan Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat; Penanggulangan TB; Tuberkulosis.

### **1. LATAR BELAKANG**

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara. Penyakit ini umumnya menyerang paru-paru, tetapi dapat pula menyerang

organ tubuh lainnya. Keberadaan TB masih menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat karena angka kesakitan dan kematiannya yang masih cukup tinggi (Hariadi *et al.*, 2023).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) melalui *Global Burden of Disease*, tuberkulosis menempati urutan ke-13 sebagai penyebab kematian di dunia dan menjadi penyakit menular dengan jumlah kematian tertinggi kedua setelah COVID-19. Berdasarkan laporan WHO (2024), Indonesia masih menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia setelah India sehingga penyakit ini tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TB dengan angka kematian mencapai 125.000 jiwa setiap tahun atau sekitar 14 kematian setiap jamnya. Pada tahun 2024, ditemukan sekitar 885 ribu kasus TB, dengan distribusi sebanyak 496 ribu kasus pada laki-laki, 359 ribu kasus pada perempuan, serta 135 ribu kasus pada anak usia 0-14 tahun (Kemenkes, 2025). Tingginya jumlah kasus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan penemuan kasus, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala dan pencegahan TB, serta masih adanya stigma terhadap penderita (Saputra *et al.*, 2025).

TB menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, maupun berbicara sehingga percikan dahak yang mengandung bakteri dapat terhirup oleh orang lain. Gejala yang sering ditemukan meliputi batuk berdahak lebih dari dua minggu, sesak napas, demam berkepanjangan, penurunan berat badan, tubuh lemas, hingga batuk darah. Jika tidak ditangani dengan baik dan pengobatan tidak dijalani secara teratur, TB dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian (Siregar *et al.*, 2024). Selain berdampak pada kesehatan, TB juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti menurunnya produktivitas kerja, berkurangnya pendapatan keluarga, serta diskriminasi terhadap penderita akibat stigma yang masih berkembang di masyarakat (Nurjanah *et al.*, 2022).

Upaya penanggulangan TB tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memerlukan pendekatan promotif dan preventif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (Marni *et al.*, 2026). Dalam mendukung keberhasilan program pengendalian TB, salah satu strategi yang memiliki peran penting adalah advokasi kesehatan, yaitu upaya untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan program penanggulangan TB dapat berjalan secara optimal. Advokasi berperan dalam meningkatkan komitmen lintas sektor, memperkuat kebijakan

kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian TB (Ishak, 2022).

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa advokasi kesehatan berperan penting dalam mendukung program penanggulangan TB, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pendanaan, belum optimalnya dukungan kebijakan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kurang maksimalnya kerja sama lintas sektor. Selain itu, hasil penelitian terkait implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan TB juga menunjukkan hasil yang beragam sehingga efektivitas advokasi dalam mendukung keberhasilan program pengendalian TB masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, *literature review* ini dilakukan untuk menganalisis implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis serta mengidentifikasi peran dan hambatan advokasi dalam mendukung keberhasilan program pengendalian TB di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Advokasi kesehatan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan yang bertujuan memperoleh dukungan dari pengambil keputusan terhadap suatu program kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2018), advokasi adalah proses pendekatan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan agar memberikan dukungan berupa kebijakan, pendanaan, sumber daya, maupun regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program kesehatan. Dalam konteks penanggulangan TB, advokasi berfungsi mendorong komitmen pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program pengendalian TB.

Model *PRECEDE-PROCEED* yang dikembangkan oleh *Lawrence Green* merupakan salah satu model perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang banyak digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Model ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*). Faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, dan kepercayaan individu terhadap kesehatan. Faktor pendukung mencakup ketersediaan fasilitas, layanan kesehatan, serta sumber daya yang mendukung perubahan perilaku. Sementara itu, faktor penguat meliputi dukungan sosial, peran tokoh masyarakat, dan kebijakan yang dapat memperkuat keberlangsungan perilaku kesehatan (Handayani *et al.*, 2025).

Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat dalam Ottawa Charter menegaskan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan kesehatan yang memiliki

kemampuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, kader kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan promosi kesehatan, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TB (Idris *et al.*, 2025).

Keberhasilan implementasi program kesehatan juga dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Menurut teori ini, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Putri, 2025). Komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan program dipahami oleh seluruh pelaksana. Sumber daya yang memadai mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Disposisi pelaksana mencerminkan komitmen dalam menjalankan program, sedangkan struktur birokrasi berperan dalam memastikan koordinasi dan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Berdasarkan teori-teori tersebut, advokasi kesehatan dapat dipahami sebagai strategi yang berperan dalam memperkuat dukungan kebijakan, sumber daya, serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanggulangan TB. Keberhasilan advokasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian TB secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, kemitraan lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan secara terstruktur. Pencarian artikel dilakukan melalui *Google Scholar* menggunakan kata kunci advokasi kesehatan, penanggulangan tuberkulosis, program pengendalian tuberkulosis, dan kebijakan kesehatan tuberkulosis dengan rentang publikasi tahun 2021–2026. Artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu membahas implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis, dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal bereputasi, telah melalui proses *peer review*, serta memiliki data yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak membahas advokasi kesehatan dan penanggulangan tuberkulosis, tidak melalui proses *peer review*, atau memiliki data yang tidak lengkap dikeluarkan dari kajian. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian metode, serta relevansi hasil penelitian untuk mengidentifikasi bentuk implementasi advokasi, hambatan pelaksanaan, dan efektivitas advokasi dalam mendukung program penanggulangan tuberkulosis. Hasil kajian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna memberikan gambaran

mengenai peran advokasi kesehatan dalam meningkatkan keberhasilan program pengendalian tuberkulosis di masyarakat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** *Literature Review.*

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Sampel	Hasil
1.	Sitti Nurhiday anti Ishak/ 2022	Analisis Implementasi Strategi Promosi Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Tuberkulosis (TB) (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Kalumata Kota Ternate)	Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang merupakan jenis wawancara mendalam dan hasilnya dicatat dengan menggunakan perekam suara.	Informan penelitian terdiri dari 4 orang, yaitu penanggung jawab program TB sebagai informan utama, serta 2 anggota masyarakat (kepala RT dan kader kesehatan) dan 1 warga sebagai informan pendukung.	Upaya advokasi Puskesmas Kalumata telah diupayakan secara maksimal melalui dukungan pemerintah berupa obat gratis dan alokasi anggaran, namun dana operasional masih terbatas dan belum didukung kebijakan hingga tingkat RT/RW dan kelurahan, sehingga menjadi hambatan utama pengendalian dan eliminasi TB.
2.	Seina Kanaya Siregar/ 2024	Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit dalam Kampanye Eliminasi Tuberkulosis : Pendekatan Advokasi kepada Masyarakat di Surabaya	Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui penerapan metode studi kasus.	Para pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-profit, dan masyarakat yang terlibat dalam program penanganan TBC.	Advokasi lembaga non-profit terbukti efektif meningkatkan deteksi dini TBC, mengurangi stigma masyarakat, dan memperkuat peran kader kesehatan melalui edukasi, kampanye publik, serta pendekatan komunitas.
3.	Donny Alfian, Nurvi Susanti, Risa Amalia, Alhidayati/ 2021	Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	Jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai penanganan TB.	Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga informan utama, yaitu kepala puskesmas, penanggung jawab program kesehatan masyarakat, dan penanggung jawab tuberkulosis, serta dua informan pendukung yang terdiri dari kader puskesmas dan masyarakat di	Pemberdayaan masyarakat dan advokasi TB belum optimal karena pelatihan terbatas dan masih bergantung pada kebijakan serta dana BOK, namun kemitraan telah berjalan cukup baik melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta dan pihak kelurahan.

				wilayah Puskesmas Rejosari.	
4.	Feby Fitriani, Syukaihi, Dan Winda Septiani /2022	Analisis Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dalam Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Harapan Raya Kotapekanbaru Tahun 2022	Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi.	Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang. Satu orang informan kunci adalah kepala Puskesmas Harapan Raya, dua orang informan utama terdiri dari penanggung jawab promosi kesehatan dan penanggung jawab tuberkulosis. Sementara itu, terdapat empat orang informan pendukung, yang terdiri dari dua orang anggota masyarakat umum dan dua orang pasien tuberkulosis.	Pengendalian TB Paru di Puskesmas Harapan Raya belum optimal karena pemberdayaan dan advokasi masih terkendala keterbatasan sosialisasi, dana BOK, regulasi, serta rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat, meskipun kemitraan dengan klinik swasta telah berjalan baik.
5.	Ananda Lutfitarsi, Hilman Adam, Irny E. Maino/ 2025	Implementasi Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tuberkulosis Di UPTD Puskesmas Doloduo Kabupaten Bolaang Mongondow	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengamati strategi promosi kesehatan yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo dalam usaha pencegahan penyakit tuberkulosis.	Penelitian ini melibatkan enam narasumber, termasuk kepala puskesmas yang berperan sebagai informan kunci, petugas promosi kesehatan dan penanggung jawab P2 TB/Kusta sebagai informan utama, serta camat, penderita TBC, dan keluarga pasien yang berfungsi sebagai informan pendukung	Advokasi penanggulangan TB Paru belum optimal karena masih bergantung pada dana BOK, belum didukung regulasi lokal, serta rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga menghambat pencegahan dan penemuan dini kasus.
6.	Okti Indriyani, Dami Yanthi, Dan Welly Sando/ 2021	Analisis Pelaksanaan Program Tuberkulosis Di Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru	Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi.	Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yang meliputi 3 informan utama, yaitu kepala Puskesmas, penanggung jawab program TB di Puskesmas,	Advokasi penanggulangan TB belum optimal sehingga diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor, alokasi anggaran mandiri, penambahan tenaga khusus TB, serta pelibatan aktif kader,

				dan penanggung jawab program TB di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat 2 informan pendukung, yaitu manajer keuangan Puskesmas dan kader TB.	tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan penemuan kasus.
7.	Nur Syarianingsih Syam, Desi Nurfita, dan Mustika Rahmi/ 2024	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis Di Puskesmas Banguntapan I	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana aspek proses dan makna ditekankan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai suatu hal berdasarkan pandangan subjek, dalam hal ini, informan yang diteliti.	Melibatkan tiga informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari satu orang Kepala Puskesmas Banguntapan I dan dua orang penanggung jawab tim TB di Puskesmas Banguntapan.	Meskipun kolaborasi penanggulangan TB telah berjalan baik, penelitian ini mengadvokasi peningkatan anggaran operasional dan pembentukan tim TB yang lebih formal agar koordinasi dan pelaksanaan program lebih efektif.
8.	Ahmad Syakir Maulana, Mury Ririanty, Iken Nafikadini/ 2023	Upaya Promotif dan Preventif Penanggulangan TB oleh Paguyuban TB di Wilayah Kerja Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember (Sebuah Studi Kualitatif)	Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini melibatkan lima informan utama (anggota paguyuban penyakit tuberkulosis), satu informan kunci (penanggung jawab program penyakit tuberkulosis), dan tiga informan pendukung.	Peran advokasi Paguyuban TB terbukti efektif mendukung perbaikan program penanggulangan TBC melalui koordinasi dengan pemerintah dan puskesmas, serta evaluasi rutin berbasis data untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan keberhasilan pengobatan.
9.	Astri Yunita, Ern Rahmawati, Liya Ni'matul Maula, Dan Fresty Africia/2024	Optimalisasi Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Tbc Paru Di Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024	Metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pendekatan teori, pendekatan praktis serta pendekatan advokasi dan penyuluhan kepada Camat, kepala desa, dan lurah di Kecamatan Pare.	Kegiatan ini melibatkan 20 kader kesehatan sebagai pelaksana investigasi lapangan, dengan sasaran 5 kasus indeks TB paru, 57 rumah untuk pemeriksaan sanitasi lingkungan, serta 217 jiwa, di mana 215 kontak berhasil diskriming untuk penemuan kasus potensial.	Advokasi di PKM Pare secara nyata efektif membangun komitmen lintas sektor, memperkuat dukungan operasional kader, menyediakan media KIE, serta mendorong program pemberian makanan tambahan bagi pasien TBC untuk mempercepat kesembuhan dan menekan penularan.

10.	Chandra Buana, Almaini, Yanti Sutriyanti, Fatimah Khoirini, Rustam Aji Ari Ikhwan, Sridiany/ 2023	Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Penyakit TBC Paru Di KEC. Curup KAB. Rejang Lebong Tahun 2021	Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama, pendekatan teoritis. Kedua, pendekatan praktik berupa investigasi kasus dan pendampingan penderita TB paru di wilayah kerja PKM Curup. Ketiga, kegiatan advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, pimpinan PKM Curup, Camat Curup, serta kepala desa dan kelurahan di Kecamatan Curup.	Sampel dalam kegiatan ini terdiri dari 20 orang kader kesehatan yang dilatih untuk melakukan pelacakan kasus. Selain itu, sampel sasaran investigasi kontak yang dilakukan mencakup 5 orang kasus indeks (penderita TB paru), 57 rumah atau kepala keluarga, serta 215 hingga 217 jiwa yang merupakan kontak erat dari kasus indeks tersebut.	Advokasi lintas sektor di Kecamatan Curup berhasil memperkuat dukungan kebijakan, operasional, dan infrastruktur melalui kemitraan antarinstansi, pendampingan kader, penyediaan media KIE, program gizi pasien, serta perbaikan sanitasi lingkungan untuk mendukung pengendalian TBC secara komprehensif.
-----	---	---	---	---	--

Berdasarkan hasil telaah beberapa artikel, implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa advokasi berperan dalam memperkuat program penanggulangan TB, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendukung program penanggulangan TB.

### **Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran dan Deteksi Dini TB**

Implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TB serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan secara tuntas. Penelitian oleh Siregar (2024) menunjukkan bahwa advokasi melalui edukasi langsung, kampanye publik, pendekatan komunitas, dan pelatihan kader kesehatan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini TB serta mengurangi stigma sosial terhadap penderita TB. Kegiatan advokasi tersebut membantu masyarakat memahami bahwa TB merupakan penyakit menular yang dapat dicegah dan disembuhkan apabila pengobatan dilakukan secara teratur hingga tuntas.

Hal ini sesuai dengan teori *Lawrence Green* yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan sikap masyarakat merupakan faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang dapat

memengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai TB, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan, pemeriksaan dini, dan kepatuhan terhadap pengobatan (Romadhon *et al.*, 2024).

### **Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor dan Dukungan Program dalam Penanggulangan TB**

Implementasi advokasi juga berperan dalam memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung program penanggulangan TB. Penelitian yang dilakukan Maulana *et al.* (2023) menunjukkan bahwa implementasi advokasi oleh Paguyuban TB mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan puskesmas melalui pencatatan kasus, evaluasi rutin, serta pemantauan terhadap penemuan suspek TB dan pasien putus obat sehingga program penanggulangan TB dapat berjalan lebih efektif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Yunita *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa advokasi kepada pemerintah, tokoh masyarakat, dan Dinas Kesehatan mampu menciptakan dukungan kebijakan, pendampingan kader kesehatan, penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta program pemberian makanan tambahan bagi pasien TB. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program TB tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat. Selain itu, penelitian Buana *et al.* (2023) menunjukkan bahwa advokasi lintas sektor berhasil memperoleh dukungan regulasi, operasional, dan perbaikan sanitasi lingkungan dalam upaya penanggulangan TB. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan dukungan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pengendalian TB.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Jansfianti *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa advokasi kepada pemegang kebijakan dan penguatan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mendukung promosi kesehatan, memperkuat program penanggulangan TB, dan meningkatkan penemuan kasus TB secara dini di masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan teori *Lawrence Green* yang menyatakan bahwa keberhasilan program kesehatan dipengaruhi oleh faktor pendukung (*enabling factors*), seperti dukungan organisasi, koordinasi program, akses pelayanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan (Widiyaningsih & Suharyanta, 2020).

### **Keterbatasan Pendanaan dalam Implementasi Program Penanggulangan TB**

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi advokasi berperan penting dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan TB, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan TB belum terjadi secara merata di seluruh daerah karena masih terdapat kendala dalam aspek pendanaan, dukungan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dan lintas sektor. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi program TB di beberapa wilayah belum berjalan optimal dan masih berada di bawah target nasional.

Salah satu hambatan yang paling sering ditemukan dalam implementasi penanggulangan TB adalah minimnya pendanaan program. Penelitian oleh Ishak (2022), Alfian *et al.* (2021), Fitriani *et al.* (2022), dan Indriyani *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kegiatan advokasi belum mampu mendorong dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah daerah. Pelaksanaan program masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang jumlahnya terbatas dan sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Akibatnya, kegiatan sosialisasi, pelacakan kasus, pendampingan pasien, hingga pemberdayaan kader kesehatan belum dapat dilakukan secara optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lustiyati & Untari (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan program TB masih menghadapi berbagai kendala karena tingginya ketergantungan pada dana donor dan belum optimalnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya advokasi dalam mendorong komitmen pembiayaan dan keberlanjutan program TB agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Keterbatasan Dukungan Kebijakan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Program TB**

Selain keterbatasan pendanaan, lemahnya dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat penanggulangan TB. Penelitian oleh Ishak (2022), Lutfitasari *et al.* (2025), serta Syam *et al.* (2024) menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan regulasi dan dukungan kebijakan yang kuat di tingkat daerah. Dukungan yang diberikan masih cenderung bersifat administratif dan belum diwujudkan melalui penguatan anggaran, pembentukan struktur organisasi TB, maupun dukungan operasional lapangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Wahyuningsih *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan TB di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan berupa kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, keterbatasan infrastruktur, distribusi sarana yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap TB. Hal ini

menunjukkan bahwa proses advokasi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Hambatan lain juga terlihat pada belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan kerja sama lintas sektor dalam mendukung program TB. Penelitian Alfian *et al.* (2021) dan Fitriani *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pelatihan kader kesehatan masih terbatas dan partisipasi tokoh masyarakat belum berjalan aktif sehingga edukasi mengenai TB belum tersebar secara merata. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Andriani (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan TB di Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 81%, masih berada di bawah target nasional sebesar 90%, sedangkan cakupan investigasi kontak TB baru mencapai 25% dari target nasional sebesar 90%. Data tersebut menunjukkan bahwa advokasi kepada masyarakat dan lintas sektor belum berjalan maksimal dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program TB.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TB) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pengendalian TB. Advokasi kesehatan terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerja sama lintas sektor, mendukung penemuan kasus secara dini, meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien, serta mengurangi stigma terhadap penderita TB. Selain itu, advokasi juga berperan dalam mendorong dukungan kebijakan, pemberdayaan kader kesehatan, serta penguatan program promotif dan preventif di masyarakat. Namun, pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pendanaan program, belum optimalnya dukungan kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang maksimalnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung program TB. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan TB belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan advokasi kesehatan melalui peningkatan komitmen pemerintah daerah, dukungan pendanaan yang memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar program pencegahan dan penanggulangan TB dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfian, D., Susanti, N., Amalia, R., & Alhidayati, A. (2021). Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 7(1), 57-63.
- Andriani, H. (2024). Management Overview of the Lung Tuberculosis Control Program at the DKI Jakarta Provincial Health Office in 2023. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 9(2).
- Buana, C., Almaini, A., Sutriyanti, Y., Khoirini, F., Aji, R., Ikhwan, A., & Sridiany, S. (2023). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Penyakit TBC Paru Di Kec. Curup Kab. Rejang Lebong TAahun 2021. *AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 11-21.
- Fitriani, F., Syukaisih, S., & Septiani, W. (2022). Analysis Of Health Promotion Implementation In Pulmonary Tuberculosis Disease Control In Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru 2022: Analisis Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dalam Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Harapan Raya Kotapekanbaru Tahun 2022. *Jurnal Olahraga dan Kesehatan (ORKES)*, 1(2), 133-139.
- Handayani, G. L., Fauziah, R., Trisnaningsih, R., Lariwu, C. K., Suwarja, S., Faisal, T. I., ... & Manurung, I. V. (2025). *Ilmu Perilaku Kesehatan Dan Promosi Kesehatan*. Kota Kendari: Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan
- Hariadi, E., Buston, E., Nugroho, N., & Efendi, P. (2023). Stigma masyarakat terhadap penyakit Tuberkulosis dengan penemuan kasus Tuberkulosis BTA Positif di Kota Bengkulu tahun 2022. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 43-50.
- Idris, H., Ainy, A., Safriantini, D., & Munawarah, S. H. (2025). Peningkatan Kapasitas dan Peran Kader Tuberkulosis Melalui Edukasi Berbasis Modul dan Flipchart. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(1), 101–112.
- Indriyani, O., Yanthi, D., & Sando, W. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Tuberkulosis di Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru: Analysis Of Implementation Tuberculosis Programs In Harapan Raya Public Health Center, Pekanbaru. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(3), 899-919.
- Ishak, S. N. (2022). Analisis implementasi strategi promosi kesehatan dalam pencegahan penyakit tuberkulosis (TB) (Studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kalumata Kota Ternate). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(12), 1567-1577.
- Jansfianti, M., Sitorus, R. S., & Lubis, B. (2025). Analysis of Factors Affecting The Implementation Of Health Promotion Programs For Pulmonary Tb Patients At Grandmed Hospital Lubuk Pakam In 2024. *Jurnal Kesmas Dan Gizi (JKG)*, 8(1), 714-724.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Gerakan Indonesia Akhiri TBC*. <https://kemkes.go.id/id/indonesias-movement-to-end-tb>
- Lustiyati, E. D., & Untari, J. (2021). Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(04), 217-229.

- Lutfitasari, A., Adam, H., & Maino, I. E. (2025). Implementasi strategi promosi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit tuberkulosis di UPTD Puskesmas Doloduo Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(3), 13426–13437.
- Marni, L., Armaita, A., Yuderna, V., Wulandari, R., Karinia, Y. P., & Armalini, R. (2026). Penerapan Model Lingkungan Sehat Berbasis Health Education Sebagai Pencegahan Tuberculosis (TB) Di Nagari Punggung Kasiak Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(3), 561-567.
- Maulana, A. S., Ririanty, M., & Nafikadini, I. (2023). Upaya Promotif dan Preventif Penanggulangan TB oleh Paguyuban TB di Wilayah Kerja Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember (Sebuah Studi Kualitatif). *Health Promotion And Community Engangement Journal*, 1(2), 48-57.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurjanah, A., Rahmalia, F. Y., Paramesti, H. R., Laily, L. A., PH, F. K. P., Nisa, A. A., & Nugroho, E. (2022). Determinan sosial tuberculosis di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 3(1), 71-82.
- Putri, A. S. (2025). Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis (TBC) di Puskesmas Kalijudan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(02), 46-58.
- Romadhon, M., Wulandari, R., Rimbawati, Y., Amalia, R., & Sari, R. G. (2024). *Buku Ajar: Promosi Kesehatan*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Saputra, D., Anasrullah, A., Meyrani, P. N. P. E. D., Kurnia, K., & Lestari, A. T. (2025). Sosialisasi Pencegahan Penyakit Tbc Untuk Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Menurunkan Kasus Tbc Di Desa Tanjung. *Jurnal Wicara Desa*, 3(3), 580-594.
- Siregar, P. A., Farashati, J. I., Syafira, A. C., & Febrina, D. (2024). Konsep epidemiologi terjadinya penyakit tuberkulosis. *Zahra: Journal Of Health And Medical Research*, 3(2), 462-470.
- Siregar, S. K. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit dalam Kampanye Eliminasi Tuberkulosis: Pendekatan Advokasi kepada Masyarakat di Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Syam, N. S., Nurfita, D., & Rahmi, M. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberculosis di Puskesmas Banguntapan I. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8, 575-584.
- Wahyuningsih, A., Yolanda, O., & Sabatina, S. (2025). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberculosis: Literature Review. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(1), 56-63.
- Widiyaningsih, D., & Suharyanta, D. (2020). *Promosi dan Advokasi Kesehatan*. Sleman: Deepublish.
- World Health Organization. (2024). *Global tuberculosis report 2024*. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024>
- Yunita, A., Rahmawati, E., Maula, L. N. M., & Africia, F. (2024). Optimalisasi pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi TBC paru di Pare Kabupaten Kediri tahun 2024. *Indonesian Health Literacy Journal*, 1(2), 70-77.